

# PEREMPUAN DALAM POLITIK : STUDI KASUS PARTISIPASI SELEBRITIS PEREMPUAN DALAM KOMUNIKASI POLITIK DI PARTAI-PARTAI ISLAM PADA PEMILU 2014 DI INDONESIA

**Mohammad Zamroni, Anisah Indriati, Mukhammad Sahlan**

*incesurel@yahoo.com*

*Dosen Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## **Abstrak**

*Penelitian ini dilakukan untuk melihat partisipasi selebritis perempuan khususnya OA pengurus Partai Persatuan Pembangunan dan DR pengurus Partai Amanat Nasional dalam komunikasi politik di partai politik maupun di legislatif yang akan dikaji pada persoalan selebritis perempuan sebagai seorang komunikator politik, pesan politik yang akan disampaikan, media komunikasi politik yang dipakai, khalayak politik yang menjadi sasarannya, dan analisa efek komunikasi politik yang muncul. Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor DPP PPP dan DPP PAN Jakarta dan di DPR RI. Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus tunggal dengan pendekatan fenomenologis dan termasuk penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi langsung, serta mengkaji dokumen dan arsip. Teknik analisis data dilakukan dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Tingkat kesejahteraan para selebritis perempuan khususnya OA dan DR sesungguhnya tidak perlu dikhawatirkan, bahkan mereka diatas rata-rata tingkat kesejahteraan perempuan lainnya. Kedua, tidak semua akses sumberdaya ekonomi, sosial dan politik bagi perempuan didapatkan baik di lembaga formal maupun informal termasuk bagi OA dan DR. Ketiga, saat ini selebritis perempuan termasuk OA dan DR lebih sadar dan kritis terhadap berbagai bentuk kehidupan terutama bagi masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan yang lebih maju. Keempat, peran perempuan dalam lembaga legislatif maupun partai politik belumlah setara dengan peran serta laki-laki. Kelima, selebritis perempuan khususnya OA dan DR belum mempunyai kesetaraan dalam hal kontrol/kuasa yang sama sebagaimana halnya dengan laki-laki, untuk mengubah kondisi posisi, masa depan diri dan komunitasnya. Hubungannya dengan komunikasi politik hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa beberapa adanya peran penting yang dilakukan selebritis perempuan meliputi; peran selebritis perempuan sebagai komunikator politik, pesan politik selebritis perempuan, media komunikasi politik selebritis perempuan, khalayak komunikasi politik selebritis perempuan, dan efek komunikasi politik selebritis perempuan termasuk OA dan DR.*

**Kata kunci:** *Perempuan, Politik, Partisipasi, Komunikasi Politik, Partai Islam, Pemilu*

## **Abstract**

*This study was conducted to see the participation of celebrity women, especially OA board of Partai Persatuan Pembangun and the DR board of Partai Amanat Nasional in political communication in political parties and in the legislature that will be studied on the issue of celebrity women as a political communicator, a political message to be delivered, media political communication is used, political audiences it addresses, and analyzes the effects of political communication appears. The location of this research is done in the office of the DPP and the DPP PAN Jakarta and in the House of*

*Representatives. This study was a single case study with a phenomenological approach and includes descriptive analytical research. Data collection techniques with in-depth interviews, direct observation, as well as reviewing documents and archives. Data analysis techniques performed by an interactive model. The results showed: First, the level of welfare of women, especially celebrities and DR OA actually nothing to worry about, even those above the average rate of other women's welfare. Second, not all access to economic resources, social and political for women available in both formal and informal institutions, including for OA and DR. Third, the current female celebrities including OA and DR more conscious and critical of the various forms of life, especially for urban communities with more advanced levels of education. Fourth, the role of women in the legislature and political parties has not been equivalent to the participation of men. Fifth, in particular female celebrities OA and DR does not have any equality in terms of control or the same power as with men, to change the conditions of the position, the future of themselves and the community. His relationship with political communication research findings indicate that some of their important roles performed include female celebrities; the role of women as a political communicator celebrities, political messages female celebrities, female celebrities media of political communication, political communication celebrities female audience, and the effects of political communication female celebrities including OA and DR.*

**Keywords:** *Women, Political Participation, Political Communication, the Islamic Party, the Election*

\*\*\*\*\*

## **PENDAHULUAN**

Pesta demokrasi tiap lima tahun sekali yang diselenggarakan bangsa Indonesia pada tahun 2014 ini telah selesai dilaksanakan baik Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden-Wakil Presiden secara langsung. Tentunya ada segudang asa dan harapan untuk perbaikan bangsa ke depan, terlebih memperbaiki kualitas demokrasi dan melanjutkan proses pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu dari komponen pembangunan tersebut adalah kaum perempuan. Struktur sosial selama ini memposisikan perempuan sebagai objek pembangunan. Karenanya, perempuan selalu tertinggal. Salah satu hambatannya adalah *stereotipe* tentang perempuan, yang menempatkan perempuan selalu dalam posisi nomor dua.

Selama ini ada anggapan bahwa dunia politik identik dengan dunia laki-laki. Anggapan ini muncul akibat adanya "*image*" yang tidak sepenuhnya tepat tentang kehidupan politik; yaitu bahwa politik itu kotor, keras, penuh intrik, dan semacamnya, yang diidentikkan dengan karakteristik laki-laki. Akibatnya, jumlah perempuan yang terjun di dunia politik kecil, termasuk di negara-negara yang tingkat demokrasinya dan persamaan hak dasarnya cukup tinggi. Selain itu, kesan semacam itu muncul karena secara historis khususnya pada tahap awal perkembangan manusia, kaum pria selalu identik dengan "Lembaga" atau aktivitas kerja di luar rumah, sementara perempuan bertugas menyiapkan kebutuhan keluarga di dalam rumah seperti memasak, mengasuh anak, dan melayani suami.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, tingkat modernisasi dan globalisasi informasi serta keberhasilan gerakan emansipasi perempuan dan feminisme; sikap dan peran perempuan khususnya, pandangannya tentang dunia politik mulai mengalami pergeseran. Perempuan tidak lagi berperan sebagai ibu rumah tangga yang menjalankan

fungsi reproduksi, mengurus anak dan suami atau pekerjaan domestik lainnya, tetapi sudah aktif berperan di berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik. Walaupun perempuan sudah terlibat ke sektor publik, namun jumlahnya masih relatif kecil. Hal ini sangat kontras dengan presentase jumlah penduduk perempuan Indonesia.

Gejala selebritis masih menjadi fenomena baru dalam dunia politik, mengingat sosok artis di mata khalayak masih kental dengan dunia *entertainment* yang cenderung glamor. Namun mengapa khalayak sampai terbius juga oleh kehadiran selebritis, fenomena ini menurut Erving Goffman dan Kenneth Burke, bahwa dunia ini seperti layaknya panggung sandiwara, di mana setiap orang memiliki lakon dan alur cerita yang jelas. Berarti bahwa dunia politik memang berperan sebagai layaknya panggung sandiwara yang diperankan oleh seorang selebritis. Tentu sang selebritis akan menjalankan peran dan karakter tokoh yang dimainkannya dalam film atau panggung sandiwara.

Sebelum artis-artis itu berniat terjun dalam panggung dunia politik, tentu kita masih ingat beberapa selebritis perempuan yang telah sukses memasuki dunia politik seperti Marisa Haque, Reny Jayusman, Nurul Arifin, Rieke Diah Pitaloka, Angelina Sondakh, OA, dan artis-artis lainnya. Tak menutup kemungkinan dari artis-artis yang telah sukses memasuki panggung politik maka menggiring artis-artis yang lain berbondong-bondong hijrah ke dunia politik termasuk beberapa selebritis perempuan yang sekarang menjadi calon legislatif.

Hal menarik pada Pemilu 2014 ini adalah munculnya banyak artis-artis yang menjadi calon legislatif dari berbagai partai. Dalam catatan KPU RI menunjukkan bahwa partai-partai yang berideologi nasional seperti Nasdem, PDI-P, Demokrat, Gerindra, Golkar dan Hanura, masing-masing mencalonkan secara berurut sebanyak 7, 5, 3, 11, 4 dan 3. Dari segi jumlah terlihat Gerindra mencalonkan 11 orang, diikuti Nasdem sebanyak 7 orang, PDI-P 5 orang dan lainnya dibawah 5 orang. Tapi yang paling wah adalah dari partai yang berideologi agama atau paling tidak berbau agama atau berorientasi pada dukungan yang berbasis agama (Islam). Lihat saja Partai Amanat Nasional dengan caleg artis sebanyak 18 orang, kemudian di ikuti PKB sebanyak 16 orang, dan PPP sebanyak 6 orang ([www.muslimpoliticians.blogspot.com](http://www.muslimpoliticians.blogspot.com)). Sederet nama selebritis perempuan yang didaftarkan ke KPU sebagai calon legislatif di PAN misalnya ada Ashanti, Dessy Ratnasari, Devi Permatasari, Meiliana Pancarini, Ayu Ashari, Marissa Haque, dan Soraya Hapsari. Sedangkan di PKB ada nama-nama selebritis perempuan beken seperti Gita KDI, Tia AFI, Arzetti Bilbina, Theodora Meilani Setyowati, dan Iyeth Bustami. Disusul kemudian PPP terdaftar nama-nama selebritis perempuan semisal Angel Lelga, Lyra Virna, Emilia Contesa, Okky Asokawati, dan Ratih Sanggarwati.

Tentu kita semua bertanya-tanya, mengapa partai-partai muslim demikian banyak mencalonkan artis. Apa mereka benar-benar serius atau karena mengikuti selera pasar dalam upaya menggaet sebanyak mungkin pemilih. Jalan pikiran mereka mengambil jalan pintas, sebenarnya dapat dipahami. Dengan mengambil caleg artis, biaya kampanye mudah ditekan, apalagi kalau caleg tersebut popularitasnya tinggi dan banyak uang, sehingga partai tidak perlu keluar duit malah dapat duit. Dilain pihak, kalau toh mereka terpilih akan sangat menguntungkan partai karena mudah dikendalikan dan diharapkan sikap mereka lebih pragmatis dalam melakukan 'deal-deal' politik. Beda dengan orang yang punya prinsip, yang sangat sukar untuk dikendalikan.

Bagaimanapun juga, hadirnya selebritis di panggung politik memberikan warna baru dalam sistem demokratisasi dan tentunya popularitas seorang selebriti sudah tak

diragukan lagi bahkan mereka bisa menembus dari level bawah sampai atas di masyarakat. Demikian halnya dengan kiprah selebritis perempuan di panggung politik.

Bertolak dari pemahaman terhadap pentingnya keterlibatan perempuan sebagai sumberdaya yang potensial dalam proses dan pembangunan politik, maka studi tentang partisipasi selebritis perempuan dalam komunikasi politik di partai-partai Islam pada Pemilu 2014 di Indonesia menjadi urgen untuk diteliti. Lebih-lebih dalam era reformasi politik sekarang ini, demokrasi dan transparansi politik memberi peluang bagi perempuan untuk berkiprah lebih banyak.

Tiga masalah pokok yang diangkat untuk dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana partisipasi selebritis perempuan dalam komunikasi politik di partai-partai Islam pada pemilu 2014 di Indonesia?; (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi selebritis perempuan dalam komunikasi politik di partai-partai Islam pada pemilu 2014 di Indonesia?; dan (3) Bagaimana persepsi masyarakat (khalayak) terhadap partisipasi selebritis perempuan dalam komunikasi politik di partai-partai Islam pada pemilu 2014 di Indonesia?.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan mendeskripsikan partisipasi selebritis perempuan dalam komunikasi politik di partai-partai Islam pada pemilu 2014 di Indonesia; mengetahui faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi partisipasi; serta menganalisis persepsi masyarakat (khalayak) terhadap partisipasi selebritis perempuan dalam komunikasi politik di partai-partai Islam pada pemilu 2014 di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini di DPR RI dan Kantor DPP Partai-Partai Islam di Jakarta. Penelitian ini bermaksud mendeskripsikan dan mengeksplorasi peran selebritis perempuan dalam membangun komunikasi politik di partai-partai Islam pada pemilu hubungannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, maka pendekatan yang dipakai adalah fenomenologi yang berusaha untuk memahami makna dari berbagai peristiwa dan interaksi manusia di dalam situasinya yang khusus (Sutopo, 2002:25).

Sementara itu, jenis penelitian ini tergolong dalam bentuk studi kasus tunggal. Sebagaimana dikatakan Sutopo (2002:112) suatu penelitian dikategorikan studi kasus tunggal, bilamana penelitian tersebut terarah pada satu karakteristik. Sumber daya penelitian ini digali melalui informan/narasumber, tempat/peristiwa, dan dokumen/arsip. Sedangkan pengambilan datanya dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dan mengkaji dokumen/arsip. Validitas data dilakukan dengan cara triangulasi dan kecukupan referensi. Sementara melihat unit analisis dalam penelitian ini dengan karakteristik yang sama dan melihat penelitian ini termasuk studi kasus tunggal, maka teknik analisis yang diambil dan digunakan adalah teknik deskriptif analitik. Pada tiap proses analisisnya dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif (Miles & Huberman, dalam Sutopo, 2002:96).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Marjinalisasi Perempuan**

Perbedaan gender (*gender differences*) tersebut berlangsung terus menerus dalam sejarah yang sangat panjang dan kompleks hingga sekarang. Ia dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial hingga banyak yang dianggap sebagai ketentuan Tuhan (seolah-olah bersifat biologis yang tidak dapat

diubah lagi), sehingga perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai sebuah kodrat (Fakih, 1996:15).

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi biologis antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya. Interpretasi budaya terhadap perbedaan jenis kelamin inilah yang disebut gender. Seberapa besar peranan perbedaan jenis kelamin (seks) menentukan perbedaan gender tidak cukup lagi diterangkan dalam beberapa teori saja seperti teori psikoanalisa, teori fungsionalis struktural, teori konflik, berbagai teori feminis, dan teori sosio-biologis.

Teori psikoanalisa beranggapan bahwa peran dan relasi gender ditentukan oleh dan mengikuti perkembangan psikoseksual, terutama dalam masa *phallic stage*, yaitu suatu masa ketika seorang anak menghubungkan identitas ayah dan ibunya dengan alat kelamin yang dimiliki masing-masing. Rasa rendah diri seorang anak perempuan mulai muncul ketika dirinya menentukan “sesuatu” yang kurang, yang oleh Freud diistilahkan dengan “kecemburuan alat kelamin” (*penis envy*).

Teori fungsionalis struktural yang mendasarkan pandangan kepada keutuhan masyarakat beranggapan bahwa keterkaitan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan unsur yang berpengaruh di dalam keutuhan masyarakat. Oleh karena itu, menurut Talcot Parsons, salah seorang penggagas teori ini, pembagian peran laki-laki dan perempuan tidak didasari oleh disrupsi dan kompetisi tetapi lebih kepada melestarikan harmoni dan stabilitas di dalam masyarakat (Talcot Parsons dan Robert F. Bales, eds., 1955:23). Jadi fungsi dan peran masih didasarkan kepada jenis kelamin, karena itu, sistem patriarki yang memberikan peran menonjol kepada laki-laki dianggap suatu hal yang wajar.

Menurut Lips (dalam Umar, 1999:55) ada beberapa unsur pokok dalam teori fungsional struktural yang sekaligus menjadi kekuatan teori ini, yaitu:

a. Kekuasaan dan Status

Dorothy Dinnerstein dan Nancy Chodorow, mengemukakan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan menimbulkan status yang berbeda. Laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dan status lebih tinggi dibanding perempuan. Relasi kuasa dan status ini dijadikan dasar dalam menentukan pola relasi gender.

Pola kekuasaan dan status ini berpengaruh secara universal di dalam masyarakat. Tidak sedikit kebijakan dan peraturan lahir di atas persepsi tersebut dan tidak heran kalau di dalam masyarakat muncul ideologi gender yang berupaya meninjau secara mendasar berbagai kebijakan dan peraturan yang dinilai tidak berwawasan gender.

b. Komunikasi Non-Verbal

Komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berlangsung dalam suasana apa yang disebut Nancy Henley dan J. Freeman sebagai kemampuan kurang (*less powerfull*) bagi perempuan dan kemampuan lebih (*more powerfull*) bagi laki-laki. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk menegur sapa kepada perempuan daripada laki-laki. Karena perempuan dinilai memiliki kekuasaan yang tidak memadai maka masyarakat (laki-laki) cenderung memandang “rendah” terhadapnya.

Dalam suasana selalu dikontrol, perempuan dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-hati, sementara laki-laki dengan otoritas yang dimilikinya menampilkan diri secara terbuka. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk melakukan reaksi awal terhadap perempuan daripada sebaliknya. Ini sejalan dengan

yang dikatakan S.Weitz (dalam Talcot Parsons dan Robert F.Bales, eds., 1955:56) bahwa situasi seperti ini sangat berpengaruh di dalam relasi gender, karena dengan demikian skor laki-laki akan lebih unggul dalam penentuan norma-norma dalam kehidupan masyarakat.

c. Perempuan di dalam Berbagai Organisasi

Kedudukan perempuan di dalam berbagai organisasi baik kemasyarakatan maupun politik diperhatikan secara khusus oleh Rosabeth Moss Kanter's. Menurutnya, ketimpangan peran gender di dalam berbagai organisasi disebabkan karena perempuan mempunyai berbagai keterbatasan, bukan saja karena secara alami laki-laki, menurut teori fungsionalis struktural, dipersepsikan sebagai kaum yang lebih unggul, atau berbagai stereotipe gender lainnya, tetapi juga karena perempuan ditemukan kurang terampil daripada laki-laki. Dalam kendali organisasi, posisi perempuan lebih mengkhawatirkan daripada laki-laki, sehingga dalam pola relasi gender masih seringkali terjadi ketimpangan.

Teori konflik yang mendasarkan pandangannya kepada pertentangan antar kelas di dalam masyarakat, beranggapan bahwa relasi gender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini paling tegas menolak semua anggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis. Menurut Karl Marx, yang juga mendapat dukungan Friedrich Engels, relasi gender yang terjadi di dalam masyarakat sepenuhnya merupakan rekayasa masyarakat (*social construction*) (Friederich Engels, 1942:5). Teori ini dinilai oleh kalangan penganut teori fungsionalis struktural terlalu bercorak ekonomi di dalam memberikan penilaian terhadap kedudukan perempuan.

Teori-teori feminis yang lebih prihatin terhadap nasib perempuan beranggapan bahwa sebenarnya kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis tetapi oleh budaya dalam masyarakat. Ketimpangan peran dan relasi gender dinilai perlu ditinjau kembali, tetapi alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda. Sehingga muncul berbagai aliran feminis agaknya masih memerlukan perjuangan panjang karena diantara gagasan-gagasannya ada yang dinilai kurang realistis, karena dunia politik merupakan bagian dari dunia publik (*public word*), yang secara umum masih didominasi oleh laki-laki (Valerie Bryson, 1992:6).

Sementara itu teori sosio-biologis yang mencoba mengelaborasi teori *nature* dan *nurture* beranggapan bahwa faktor biologis dan faktor sosial budaya menyebabkan laki-laki lebih unggul daripada perempuan. Fungsi reproduksi perempuan yang lebih rumit dianggap sebagai faktor penghambat untuk mengakses ke dunia publik, berbeda dengan laki-laki, tidak mengalami hambatan karena faktor tersebut. Yang menarik dari teori ini karena sesuai dengan hasil penelitian biogram primat dan hominid yang sering dianggap sebangsa dengan nenek moyang manusia dalam teori evolusi, ditemukan fisik dan perilaku antara jantan dan betina mempunyai perbedaan secara mendasar.

Sedangkan ideologi gender juga dapat dijelaskan dengan model pendekatan strukturalisme, seperti yang diterapkan oleh antropolog Calude Levy Strauss yang berlandaskan pada model oposisi biner (Verayanti dkk., 2003:39). Model ini menempatkan dua kategori secara bersamaan tapi saling dipertentangkan. Dalam alam pikiran manusia maupun apa yang ditunjukkan oleh alam telah menjadi sebuah universalisme dalam interaksi antarmanusia dan manusia dengan alam.

2. Komunikasi Politik

Ada yang mendefinisikan komunikasi politik sebagai segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Cakupannya meliputi studi mengenai jaringan dengan komunikasi (organisasi, kelompok, media massa, dan saluran-saluran khusus) dan determinan sosial ekonomi dari pola-pola komunikasi yang ada pada sistem yang dimaksud (Fagen dalam Nasution, 1990:24). Rumusan Galdnoor tersebut sejalan dengan pendekatan Almond dan Powell (dalam Nasution, 1990:24) yang menempatkan komunikasi sebagai suatu fungsi politik bersama-sama dengan fungsi lainnya (artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen) yang terdapat dalam suatu sistem politik. Bahkan dikemukakan pula bahwa komunikasi merupakan prasyarat (*prerequisite*) yang diperlukan bagi berlangsungnya fungsi-fungsi yang lain tadi. Menurut Almond dan Powell (dalam Nasution, 1990:24).

Kemudian juga rujukan yang dipergunakan dalam melihat politik dan komunikasi masih memakai kerangka dasar (*framework*) dari Harold D. Lasswell (1948), yaitu: *Who says What, in Which Channel, To Whom, With What Effect* (Fagen dalam Hasrullah, 2001:26). Komunikasi politik dalam perkembangannya harus dapat menjelaskan proses komunikasi yang telah dirumuskan oleh Lasswell (1948) (Mansfield dan Weaver, 1982:605) lebih khususnya lagi disiplin ilmu komunikasi politik dari berbagai pengkajian literatur secara periodik, buku-buku, dan literatur yang populer diarahkan kepada: 1). *Political communicator*, 2). *Political message*, 3). *The media of political communication*, 4). *The political audience*, 5). *Methods in the study of political* (Mansfield dan Weaver, 1982:605).

Oleh karena itu, apabila menyimak konsep komunikasi politik yang ditawarkan Dan Nimmo cukup fleksibel dalam memandang komunikasi politik secara utuh. Dari pemikiran mereka cukup dinamis dalam melihat konteks pengembangan komunikasi politik terhadap kemajuan disiplin ilmu sosial khususnya pada disiplin ilmu komunikasi dan politik. Dan tentunya pula, pemikiran Dan Nimmo yang berdimensi luas tersebut juga mengisyaratkan bahwa sifat interdisipliner yang dikembangkan dalam komunikasi politik memungkinkan disiplin ilmu tersebut tidak terpaku hanya pada dua paradigma (komunikasi dan politik) yang selalu menjadi perdebatan yang tanpa akhir. Dengan adanya batasan konsep komunikasi politik dari Dan Nimmo kita perlu mengkaji dari subjek normative dan empirik sehingga pengembangan penelitian dan teori dapat mengikuti fenomena-fenomena yang muncul dalam masyarakat.

#### a. Proses Komunikasi Politik

Seperti bentuk-bentuk komunikasi yang lain, komunikasi politik berlangsung sebagai suatu proses penyampaian *pesan-pesan* tertentu yang berasal dari sumber (selaku pihak yang memprakarsai komunikasi) kepada *khalayak*, dengan menggunakan media tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah tertentu pula. Unsur-unsur tersebutlah yang memungkinkan terjadinya suatu kegiatan komunikasi politik dalam suatu masyarakat (Nasution, 1990:42). Sekalipun keluaran (*output*) komunikasi politik pada akhirnya ditentukan oleh semua unsur tersebut secara keseluruhan, namun suatu analisis yang tersendiri terhadap masing-masing unsur perlu juga dilakukan.

Analisis yang dimaksud berguna untuk mengenali lebih jauh mengenai peran setiap unsur agar pemahaman yang menyeluruh terhadap proses komunikasi politik dapat dicapai lebih baik.

#### b. Komunikator dalam Komunikasi Politik

Sebagaimana halnya dengan peristiwa komunikasi yang lain, komunikator yang dimaksud yaitu pihak yang memprakarsai (yang bertindak sebagai sumber)

penyampaian pesan kepada pihak lain. Komunikator, yang juga disebut *source*, *encoder*, *sender*, atau *actor*, menurut Blake dan Haroldsen (dalam Nasution, 1990:43), mencerminkan pihak yang memulai dan mengarahkan suatu tindak komunikasi.

Komunikator dalam komunikasi politik dapat dibedakan dalam wujud individu-individu, lembaga, ataupun berupa kumpulan beberapa atau banyak orang (kolektif). Dengan begitu, jika seorang tokoh atau pejabat ataupun rakyat biasa bertindak sebagai sumber dalam suatu kegiatan komunikasi politik, maka dalam beberapa hal ia dapat dilihat sebagai sumber individual (*individual source*). Sedangkan pada kesempatan yang lain, memang secara jelas dapat dibedakan bahwa meskipun seseorang individu yang berbicara, tetapi ia menjurubicarai suatu lembaga atau organisasi, maka pada saat itu dapat dipandang sebagai *collective source* atau sumber kolektif (Nasution, 1990:43).

Perempuan yang berperan aktif dalam partai politik atau pun lembaga legislatif sesungguhnya memiliki kapasitas sebagai komunikator politik baik secara individual maupun mewakili lembaga atau organisasi politik. Dalam peranan ini, perempuan lebih mengupayakan bentuk partisipasi politik langsung dalam mewujudkan pembangunan politik.

Menurut pandangan umum, pembangunan politik memang meliputi kegiatan perluasan partisipasi massa, akan tetapi sangat perlu membedakan kondisi-kondisi yang memungkinkan adanya perluasan tersebut. Dari sudut sejarah, di negara-negara barat dimensi pembangunan politik erat bertalian dengan perluasan hak pilih dan pengikut sertaan kelompok-kelompok baru dalam masyarakat di dalam proses politik. Proses partisipasi massa ini berarti penyebarluasan pengambilan keputusan, di mana partisipasi tersebut berpengaruh pula terhadap masalah pilihan dan keputusan (Afan Gaffar, 1989:42).

c. Pola-Pola Komunikasi Politik

Komunikasi politik bukanlah suatu bentuk komunikasi yang spesifik dan terpisah dari model komunikasi sosial. Karena pola dasarnya yang sama, di mana terjadi pola komunikasi vertikal dan pola komunikasi horizontal, di samping pola komunikasi formal dan pola komunikasi informal.

Bagi Maran (2001:163), penting untuk diperhatikan bahwa tanpa komunikasi politik yang efektif, maka aktivitas politik akan kehilangan bentuk. Untuk itu sumber pesan, misalnya seorang calon legislatif dituntut untuk menyampaikan pesan yang jelas kepada para pendukungnya dan masyarakat luas. Di samping itu, calon yang bersangkutan pun harus tahu saluran atau sarana penyampaian informasi yang tepat. Dengan demikian dia pun boleh berharap untuk memperoleh umpan balik yang tepat pula.

Ditambahkan Maran (2001:164) bagi seorang elit politik, sumber informasi politiknya meliputi rekan kerjanya di kantor, para pejabat administratif, sekutu-sekutu politiknya, media massa, kontak-kontak periodik dengan anggota masyarakat lain, misalnya melalui kegiatan kampanye pemilihan umum, kunjungan ke berbagai daerah, dan lain-lain. Para pendengarnya terdiri dari berbagai kalangan masyarakat.

d. Perempuan dalam Sistem Politik

David Easton, seorang sarjana politik pertama yang melakukan telaahan tegas atas kehidupan politik dalam kaitannya dengan sistem dan memperkenalkan dua macam input ke dalam sistem politik, yaitu "tuntutan" dan "kebutuhan" (Easton dalam Afan Gaffar, 1989:11). Segala macam bentuk tuntutan dalam sistem politik



dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Ini pula yang terjadi terhadap peran perempuan dalam komunikasi politik. Di mana perempuan memiliki hak yang sama terhadap akses politik yang selama ini hanya dimanfaatkan oleh kaum laki-laki. Fenomena ini yang pada gilirannya mengusung perempuan untuk mewujudkan segala tuntutan dan kebutuhan dalam sistem politik.

Dalam hubungannya dengan sistem politik, klasifikasi yang dipetakan Afan Gaffar (1989:11-12) di bawah ini akan memberikan gambaran nyata tentang jarak dan variasi daripada tuntutan, yaitu:

- 1) Tuntutan untuk memperoleh barang-barang dan pekerjaan, misalnya, tuntutan tentang upah, jam kerja, pendidikan, fasilitas rekreasi, dan transportasi.
- 2) Tuntutan pengaturan tingkah laku, misalnya jaminan keselamatan, pengawasan harga, penetapan hukum perkawinan, kesehatan dan sanitasi.
- 3) Tuntutan akan partisipasi dalam sistem politik, misalnya tuntutan akan hak pilih, hak dan kesempatan untuk menduduki jabatan pemerintahan, kesempatan untuk mengorganisir kekuatan politik formal (partai politik).
- 4) Tuntutan berkomunikasi dan mendapatkan informasi, seperti tuntutan untuk menyuarakan aspirasi dan meminta keterangan dari pemerintah atas suatu kebijaksanaan umum yang sedang atau akan dijalankan.

Suatu tuntutan dapat dijelmakan dalam berbagai bentuk serta derajat dan intensitas yang berbeda-beda. Dan dalam mencapai tuntutan dalam sistem politik tersebut, David Easton membaginya atas empat (4) bagian besar, sebagaimana dikutip Afan Gaffar (1989:12), yaitu:

- 1) Dukungan materiil, seperti pembayaran pajak serta kesediaan bekerja pada jabatan-jabatan pelayanan umum, misalnya menjadi legislatif, pegawai negeri atau prajurit.
- 2) Kepatuhan pada hukum dan perundang-undangan.
- 3) Dukungan partisipatif, seperti ikut serta menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum, diskusi politik, dan semua kegiatan politik lainnya.
- 4) Memperhatikan segala sesuatu yang diumumkan pemerintah, hak pemerintah, simbol-simbol kenegaraan dan perayaan-perayaan nasional.

Jika sistem politik dan tokoh-tokoh politik tanggap atas semua tuntutan dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan berupaya untuk memprosesnya secara efektif, maka niscaya dukungan akan diperoleh dari semua lapisan masyarakat, golongan maupun perorangan yang berperan dalam sistem politik.

Artinya secara umum dapat dikatakan bahwa tuntutan akan menghasilkan kebijaksanaan ataupun tujuan-tujuan sistem politik, sedangkan dukungan seperti barang dan pelayanan, kepatuhan dan diferensial-diferensial menyediakan segala macam sumber yang akan mempermudah sistem menggali, mengatur, dan membagi-bagikan semua yang dihasilkannya. Atau dengan kata lain, dukungan akan mempermudah sistem untuk mencapai tujuannya.

#### **a. Partisipasi Politik**

Ada banyak kemungkinan yang dapat terjadi berkaitan dengan pemahaman proses partisipasi. Juga sejumlah landasan yang berhubungan dengan partisipasi itu sendiri. Menurut Davis (1967:11) partisipasi didefinisikan sebagai: *“mental and emotional involment of a person in group goal situation which encourages him to contribute to group goal and share responsibility in them”*. Baetz dan Uphoff (1979:30) mengemukakan pula bahwa: *“participation in development means how community*

*members can be assured the opportunity of contributing to the creation of the communities goods and services“.*

Sementara itu, Huntington dan Nelson (dalam Miriam Budiardjo, 1982:19) membagi partisipasi atas a) partisipasi otonom, dan b) partisipasi mobilisasi. Menurut Cohen dan Uphoff, membedakan menjadi; a) *voluntary participation*, b) *induced participation*, c) *forced participation* (Cohen dan Uphoff, 1977:37). Sedangkan menurut Byant dan White (1982:25) antara tahun 1950-an partisipasi digunakan dalam terma politik, yang berarti pemungutan suara, keanggotaan partai, kegiatan dalam perhimpunan sukarela (*voluntary association*), kegiatan proses, dan sebagainya. Kemudian pada tahun 1970-an pengertian partisipasi dikaitkan dengan proses administrasi (Cohen dan Uphoff, 1977:36). Lainnya Koentjaraningrat (1985:26) membedakan cara berpartisipasi atas dua jenis partisipasi, yaitu: partisipasi dalam aktivitas bersama dalam proyek pembangunan khusus, dan partisipasi sebagai individu di luar aktivitas bersama dalam pembangunan.

Berdasarkan sistem dan mekanisme partisipasi, Cohen dan Uphoff (1977:56) membedakan partisipasi menjadi empat jenis: a) *participation in decision making*, b) *participation in implementation*, c) *participation in benefits*, d) *participation in evolution*.

*Participation in decision making* adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijaksanaan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan pada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Bengt (1977:43) mengatakan bahwa : *“participation in organization decision making is commonly seen to a means of reducing the relative power of the executive elits, but also as a way toward a more general democratization of society”.*

*Participation in implementation*, adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung.

*Participation in evolution*, adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam panitia atau tim penilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes. Partisipasi ini merupakan bagian dari kontrol sosial.

Secara utuh partisipasi hendaknya berlangsung secara sistematis dan dinamis, berlangsung mulai dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, kemudian dilanjutkan dalam partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dan akhirnya partisipasi penilaian hasil-hasil pembangunan. Hanya dengan demikian partisipasi itu akan menjadi dinamis dan berkesinambungan.

## **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan paparan hasil penelitian dari beberapa informan, didapat data adanya partisipasi selebritis perempuan dalam komunikasi politik di partai-partai Islam pada pemilu 2014 di Indonesia. Partisipasi selebritis perempuan yang dimaksudkan hasil temuan dalam penelitian ini adalah mereka yang menjadi pengurus partai-partai serta terpilih sebagai legislatif, misalnya OA pengurus DPP Partai Persatuan

Pembangunan dan terpilih sebagai anggota DPR RI Dapil Jakarta serta DR pengurus DPP Partai Amanat Nasional dan juga terpilih sebagai anggota DPR RI Dapil Jabar periode 2014-2019.

Temuan data penelitian ini perlu dilakukan analisis lanjutan guna menemukan akar teoritik yang menghubungkan antara komunikasi politik di partai politik, legislatif, peran dan kedudukan perempuan di masyarakat, serta komunikasi politik di eksekutif/pemerintahan.

## **1. Partisipasi Selebritis Perempuan dalam Komunikasi Politik di Partai-Partai Islam pada Pemilu 2014**

### **a. Selebritis Perempuan Sebagai Komunikator Politik**

Komunikasi politik yang diperankan selebritis perempuan di Indonesia adalah bermacam-macam salurannya baik dengan menyampaikan pesan-pesan politik melalui keterlibatan mereka secara aktif sebagai politisi, profesional ataupun aktivis dalam berbagai sistem politik seperti partai politik, legislatif, organisasi masyarakat dan yang lainnya.

Dalam konteks ini, politisi perempuan di Indonesia baik yang terlibat dalam partai politik, anggota legislatif, maupun lembaga pemerintahan (eksekutif) daerah adalah mewakili kepentingan kelompok besar masyarakat terutama kaum perempuan. Hal ini diakui oleh OA<sup>1</sup> dan DR<sup>2</sup> yang cukup dilematis ketika harus memilih antara mengkomunikasikan kepentingan kelompok partai atau kelompok perempuan dan konstituen.

Jadi memang kelihatan sekali bahwa sekalipun tidak semua yang disampaikan oleh partai maupun para politisinya adalah sesuatu yang orisinal dari mereka, namun ketika mereka menyuarakannya, dianggap partai dan para politisilah yang berperan sebagai komunikator/sumber, atau yang memprakarsai peristiwa komunikasi politik yang dimaksud. Hal ini memang terasa manakala orang menyebut bahwa sesuatu hal yang tertentu merupakan “suara atau pesan partai anu”, ataupun “pendirian partai” dalam masalah-masalah yang sedang hangat misalnya.

#### **1) Komunikasi Politik Selebritis Perempuan di Partai Politik**

Persoalan perempuan masuk di gelanggang politik, sesungguhnya disambut baik oleh hampir sebagian elemen masyarakat. Begitu pula, oleh para informan penelitian ini, ketika ditanya seputar persamaan hak laki-laki dan perempuan dalam dunia politik.

Namun perlu dicatat, bahwa keberadaan perempuan di partai politik, patut kiranya diperhitungkan tersendiri oleh organisasi politik di Indonesia. Karena apabila merujuk pada jumlah penduduk maupun jumlah pemilih di Indonesia separoh lebih adalah perempuan. Ini mencerminkan betapa besar potensi perempuan yang bisa dijadikan modal dasar bagi rekrutmen politik partai-partai yang ada. Dan secara nasional representasi politik perempuan dalam pemilihan umum sangat menggembirakan, yakni mencapai 52 persen, namun sayangnya jumlah tersebut tidak diwakili secara representatif pula dalam parlemen yang hanya mencapai 11,8 persen pada pemilu tahun 2004 dan 13,4 persen pada pemilu tahun 2009, dan 14 persen di pemilu tahun 2014.

Demikian halnya, temuan penelitian menunjukkan bahwa pilihan selebritis perempuan termasuk OA dan DR untuk masuk menjadi kader Partai-Partai Islam adalah

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan OA pengurus DPP PPP dan Anggota DPR RI FPPP di ruang FPPP DPR RI Jakarta, 19 Oktober 2015.

<sup>2</sup> Wawancara dengan DR pengurus DPP PAN dan Anggota DPR RI FPAN di ruang FPAN DPR RI Jakarta, 19 Oktober 2015.

pilihan yang tepat dan penuh dengan pertimbangan. Tentunya kehadiran mereka juga memiliki peran strategis seperti posisi jabatan di partai politik baik OA maupun DR sama-sama merupakan pengurus inti di Dewan Pimpinan Pusat Partai masing-masing. Meskipun banyak selebritis perempuan yang direkrut Partai-Partai Islam hanya dijadikan pendulang suara (*vote getter*) semata.

## 2) Komunikasi Politik Selebritis Perempuan di Legislatif

Peranan perwakilan lembaga legislatif pada hakikatnya berkenaan dengan masalah hubungan antara badan tersebut, tepatnya anggota legislatif dengan anggota masyarakat yang diwakili mereka secara individu, berdasarkan kelompok maupun secara keseluruhan. Pandangan yang melihat bahwa hubungan tersebut merupakan salah satu masalah pokok di dalam kehidupan sistem politik pada umumnya, dan di dalam kehidupan proses kehidupan badan legislatif pada khususnya; bertolak dari teori tentang demokrasi.<sup>3</sup> Teori demokrasi mengajarkan kepada kita bahwa anggota masyarakat mengambil bagian atau berpartisipasi di dalam proses perumusan dan penentuan kebijaksanaan pemerintahan. Dengan kata lain, pemerintah melakukan apa yang dikehendaki oleh rakyat, setidaknya pemerintah menghindarkan diri dari apa yang tidak dikehendaki oleh anggota masyarakat.

Lebih lanjut, Arbi Sanit<sup>4</sup> menjelaskan bahwa demokrasi menentukan pula partisipasi anggota masyarakat yang dilakukan melalui wakil di lembaga legislatif. Dalam hal ini, para wakil rakyatlah yang bertindak atas nama pihak yang diwakili dan merumuskan serta memutuskan kebijaksanaan tentang berbagai aspek kehidupan. Sungguh pun demikian, tidaklah berarti secara otomatis setiap kebijaksanaan pemerintah sejajar dengan kehendak atau opini masyarakat. Sebab sekali terpilih setiap anggota legislatif sekaligus berada di dalam kemungkinan untuk memuaskan dan mengecewakan masyarakat dalam proses perumusan dan pemutusan kebijaksanaan.

Strategi *lobbying*, kontak pribadi dan berbagai pertemuan tidak resmi lainnya, dimanfaatkan pula oleh OA dan DR untuk membangun komunikasi dengan berbagai kolega anggota legislatif di DPR RI. Untuk memuluskan langkahnya dalam posisinya di Partai, komunikasi intensif dilakukan dengan sesama pengurus partai maupun sesama kolega di DPR RI. OA termasuk selebritis perempuan yang cukup senior dan kawakan di PPP juga anggota DPR dua periode berturut-turut. Sedangkan DR meskipun selebritis perempuan pendatang yang baru kali ini berkiprah di partai politik, namun melalui PAN DR mampu mendulang suara terbanyak di Dapil Jabar dalam perolehan suara legislatif pada Pemilu 2014.

### **b. Pesan Politik Selebritis Perempuan**

Dengan menganggap politik sebagai pembicaraan, maka segala pembicaraan adalah pembicaraan politik. Namun pembicaraan politik adalah pembicaraan untuk memelihara dan membantu pembicaraan mengenai masalah lain. Secara khas, ia adalah pembicaraan yang melibatkan kekuasaan, pengaruh, otoritas, dan konflik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pesan politik selebritis perempuan yang dilakukan baik OA maupun DR lebih banyak disuarakan di partai-partai masing-masing baik dalam forum rapat pengurus, dan pertemuan lainnya. Ketika di duduk DPR

---

<sup>3</sup> Arbi Sabit. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali. 1985, hlm. 203

<sup>4</sup> *Op Cit*, hlm. 204

RI, mereka juga menyampaikan pesan-pesan politik dalam forum-forum resmi maupun saat kunjungan kerja.

### c. Media Komunikasi Politik Selebritis Perempuan

Oleh sementara pihak media, media massa sering disebut sebagai *the fourth estate* dalam kehidupan sosial ekonomi. Hal ini terutama disebabkan oleh peran suatu persepsi tentang peran yang dapat dimainkan oleh media massa dalam kaitannya dengan pengembangan kehidupan sosial ekonomi dan politik masyarakat. Sebagai suatu alat untuk menyampaikan berita, penilaian atau gambaran umum tentang banyak hal, ia mempunyai kemampuan untuk berperan sebagai institusi yang dapat membentuk opini publik. Antara lain karena itu, media massa juga dapat berkembang menjadi kelompok penekan atas suatu idea atau gagasan, dan bahkan suatu kepentingan atau citra yang ia representasikan untuk diletakkan dalam konteks kehidupan yang lebih empiris.

Oleh karenanya, keberadaan media massa bagi selebritis perempuan seperti OA dan DR seperti pengakuannya ketika diwawancarai menurut mereka sebagai media komunikasi politik yang paling ampuh. Sehingga tidak heran meskipun mereka sudah menjadi anggota DPR maupun kader partai politik tetapi kegiatan di dunia keartisan tetap dijalani misalnya menjadi presenter, host, pemain sinetron, bintang iklan, modelling, dan lain sebagainya. Dengan begitu ditambahkan mereka bahwa eksistensi di media juga sebagai upaya mempertahankan popularitasnya.

Komunikator politik, apakah dia itu politikus, profesional, atau malah aktivis, selalu menggunakan pembicaraan secara persuasif, yang bertujuan baik untuk saling mempengaruhi maupun untuk mempengaruhi anggota khalayak yang kurang terlibat di dalam persoalan politik praktis. Sementara itu, alat atau upaya yang digunakan untuk mengirimkan pesan itu ialah *saluran* dari “siapa mengatakan apa kepada siapa”.

### d. Khalayak Komunikasi Politik Selebritis Perempuan

Dalam melakukan komunikasi politik kepada khalayak, perlu kiranya opini dan citra personal tentang politik. Pikiran, perasaan, dan kesediaan subjektif yang menyusun citra orang tentang politik itu berguna, dan juga memuaskan bagi orang itu. Gunanya paling sedikit tiga. *Pertama*, betapa pun benar atau kelirunya, lengkap atau tidak lengkapnya pengetahuan orang tentang politik, hal itu memberi jalan kepadanya untuk memahami peristiwa politik tertentu. Jika misalnya, orang mengetahui sesuatu tentang hubungan eksekutif-legislatif, maka orang akan mengerti mengapa legislatif jarang menyetujui anggaran yang diajukan eksekutif. *Kedua*, kesukaan dan ketidaksukaan umum pada citra seseorang tentang politik menyajikan dasar untuk menilai objek politik. *Ketiga*, citra diri seseorang memberikan cara menghubungkan dirinya dengan orang lain<sup>5</sup>.

Citra personal selebritis perempuan dalam membangun komunikasi politik adalah memiliki peran yang sangat besar bagi keberhasilan mempengaruhi khalayak. Yang pada gilirannya akan menempatkan perempuan di mata khalayak (masyarakat) berhak menerima penghargaan diri. Wujudnya bisa berupa rasa nyaman secara fisik, sejahtera, diakui orang, dihargai, baik melalui prestasi yang telah dihasilkan maupun menikmati ganjaran lahiriah bagi pengalaman mereka.

Peran di atas juga yang dilakukan oleh OA maupun DR terutama di daerah pemilihan masing-masing yang merupakan khalayak komunikasi politik mereka. Temuan penelitian di lapangan menunjukkan bahwa khalayak komunikasi politik para selebritis termasuk OA dan DR kebanyakan adalah fans berat selama berkisah di dunia

---

<sup>5</sup>Lihat, Dan Nimmo.....hlm. 6

hiburan sebagai artis. Hal ini semakin menguatkan tesis bahwa artis adalah magnet kuat yang mampu mendulang suara sehingga banyak partai melirikinya.

## **5. Efek Komunikasi Politik Selebritis Perempuan**

### **1) Terjadinya Sosialisasi Politik**

Apa yang dikatakan dari beberapa informan di atas, sesungguhnya mengindikasikan bahwa begitu pentingnya perempuan melakukan sosialisasi politik kepada masyarakat luas. Ini penting kiranya dilakukan, mengingat tanpa sosialisasi politik para politisi tidak lebih dari orang-orang yang banyak berbicara tentang politik, tetapi tidak tahu memainkan peranan penting mereka sebagai politisi yang matang. Bagaimanapun mereka harus belajar menjadi politisi yang baik dan bertanggung jawab. Untuk menjadi politisi yang matang, mereka harus belajar tahap demi tahap, seperti halnya seorang pemuda harus banyak belajar untuk menjadi orang dewasa. Yang kita harapkan dari politisi perempuan termasuk para selebritis perempuan dewasa ini adalah kemauan untuk belajar berpolitik secara demokratis.

### **2) Partisipasi Politik Perempuan**

Kebijakan politik memang sangat berarti bagi upaya pemberdayaan perempuan karena melalui keputusan politik ini segala aktivitas kehidupan dapat ditentukan. Adanya *one gate policy* atau kebijakan satu pintu yang digagas Menteri Pemberdayaan Perempuan untuk mengkoordinir kegiatan yang sensitif gender patut didukung oleh seluruh jajaran eksekutif dalam membuat kebijakan. Kalau sensitivitas gender dapat diresapi oleh seluruh pengambil kebijakan, maka dengan sendirinya program kegiatan yang direalisasikan juga akan menghargai sensitivitas gender.

Sebagai tindak lanjut, untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut. *Pertama*, memperkuat partisipasi peran perempuan dalam dunia politik. Salah satu peran penting dari manifestasi proses demokratisasi adalah bagaimana peran partai politik dalam meletakkan dasar-dasar yang fundamental, terutama peran partai politik. Partai politik di mana pun berada dapat memainkan perannya dalam proses demokratisasi berbagai institusi politik, antara lain pada anggota partai yang menjadi anggota parlemen, kelompok-kelompok politik pendukungnya (*core supporters*), dan juga dapat memainkan regulasi kekuasaan pemerintahan. Posisi strategis inilah yang menjadikan partai politik sebagai pemain kunci dalam proses demokratisasi. Jadi, partai politik menjadi wahana strategis bagi proses gregasi dan segregasi politik perempuan, melalui perannya dalam pengambilan keputusan strategis partai.

*Kedua*, bentuk partisipasi dengan mengikuti rapat umum demonstrasi dalam kampanye yang diselenggarakan oleh partai politik atau kelompok kepentingan. Dalam partisipasi politik semacam ini, perempuan hanya diorganisir oleh partai-partai politik atau kelompok-kelompok kepentingan tersebut untuk memenuhi agenda politik mereka masing-masing. Karena memang pada dasarnya, perempuan lebih mudah untuk dimobilisasi sebagai massa penggembira sekaligus sasaran program-program partai politik atau kelompok-kelompok kepentingan.

Dari hasil penelitian ini, didapatkan bahwa dari sekian banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan partai politik atau kelompok kepentingan seperti pengajian akbar, sosialisasi dan simulasi pencoblosan, kampanye dialogis/monologis dari calon bupati/wakil bupati, dan masih banyak program-program lainnya separuh lebih pesertanya adalah kaum perempuan.

*Ketiga*, bentuk partisipasi yang sebentar-bentar. Bentuk partisipasi politik semacam ini dilakukan perempuan-perempuan termasuk selebritis perempuan lewat

diskusi kecil-kecilan di dalam keluarga, tempat kerja, atau di tempat lain. Ini dilakukan oleh kelompok perempuan terutama yang teralienasi dari politik, mereka lebih berminat membahas fenomena-fenomena politik yang aktual dalam pemilihan umum, misalnya, siapa calon legislatif mereka, pilihan partai politik dan mungkin sampai pada presiden dan wakil presiden yang jadi idam-idaman mereka. Tak heran bila perbincangan politik semacam ini lebih banyak dilakukan kaum perempuan ibu rumah tangga, di kampung-kampung dan pelosok daerah yang enggan terlibat secara langsung sebagai pengurus partai politik atau kelompok kepentingan. Mereka lebih suka peran politik mereka secara informal.

*Keempat*, partisipasi politik dengan memberikan suara. Partisipasi ini biasanya dilakukan saat pemungutan suara dalam pemilihan umum, baik memilih wakil-wakil mereka dalam parlemen maupun memilih presiden dan wakil presiden. Kegiatan ini hanya dilakukan pada saat diperlukan dan untuk mengikutinya hanya diperlukan sedikit inisiatif.

### 3) Mempengaruhi Pemilu

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang mempengaruhi pemilihan umum bisa berupa; keberadaan seseorang dalam partai politik, pendaftaran untuk memilih, pemberian suara dalam pemilihan umum, pengambilan bagian dalam kampanye, mengikuti informasi tentang politik, masuk organisasi kepentingan umum dan politik, dan menghubungi pejabat pemerintah.

Efek dari komunikasi politik yang lain adalah mempengaruhi pemilu ini telah dilakukan oleh selebritis perempuan baik OA maupun DR dengan memberikan hak suara dalam pemilu sendiri. Wujud nyata partisipasi tersebut, juga dilakukan dengan menjadi pengurus partai, menjadi juru kampanye dan keaktifan dalam partai politik.

### 4) Mempengaruhi Pejabat Pembuat Kebijakan Politik

Dalam komunikasi politik ada semacam keterikatan dan keterkaitan dengan opini publik dan kebijakan pemerintah. Artinya apa yang dipikirkan rakyat dan apa yang dilakukan pemerintah itu memiliki keterkaitan.

Untuk menyampaikan pesan politik sekaligus mempengaruhi para pejabat pembuat kebijakan, tentunya rakyat harus memiliki perwakilan. Dan perwakilan itu terjadi jika garis-garis komunikasi menghubungkan publik dengan pembuat kebijakan dalam pembuatan kebijakan, garis yang menyalurkan preferensi kebijakan, keputusan dan penerimaan atau penolakan.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peran Selebritis Perempuan dalam Komunikasi Politik di Partai-Partai Islam pada Pemilu 2014**

### **a. Persepsi Masyarakat Terhadap Selebritis Perempuan dalam Membangun Komunikasi Politik di Partai-partai Islam pada Pemilu**

Tampaknya selebritis perempuan dalam panggung politik tidaklah sertamerta diterima masyarakat dengan terbuka. Bahkan langkah OA maupun DR yang maju di pemilu 2014 dan menjadi pengurus partai pun tidak dengan tanpa hambatan. Salah satunya adalah isu gender. Persepsi masyarakat pada umumnya masih meragukan kepemimpinan perempuan, apalagi selebritis yang biasanya mereka kenal suka glamor dan bergaya hidup mewah. Bagi mereka rasanya selebritis perempuan tak akan mungkin mampu memimpin.

Sementara itu komunikasi politik selebritis perempuan dalam hal ini OA dan DR yang maju sebagai calon legislatif pada pemilu 2014 di dapil masing-masing mendapatkan tanggapan yang beragam dari masyarakat. Hal ini wajar karena keduanya

merupakan satu-satunya calon legislatif perempuan yang berprofesi sebagai artis. Belum lagi masyarakat juga masih dihinggapi rasa keragu-raguan karena selama lima tahun sebelum artis/selebritis perempuan yang jadi legislatif tidak banyak yang berperan dan tidak pula berkontribusi maksimal. Artinya masyarakat masih beranggapan selebritis perempuan tidak mampu dalam memimpin. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap sikap para pemilih di Pemilu saat itu, khususnya kelompok organisasi perempuan.

b. Modal Penting Selebritis Perempuan dalam Menjalinkan Komunikasi Politik pada Pemilu 2014

Modal penting yang sudah dimiliki seorang selebritis perempuan adalah popularitas. Dengan popularitas yang dimiliki selebritis perempuan, mereka tidak perlu melakukan promosi ke khalayak ramai karena sudah terkenal lebih dulu. Demikian yang dikatakan AT<sup>6</sup> Pengurus DPP PPP dan juga anggota DPR RI FPPP saat OA maju sebagai calon legislatif pada pemilu tidaklah repot untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Ditambahkan juga selain modal popularitas yang dimiliki selebritis perempuan juga mustinya juga mempersiapkan materi yang cukup sebagai modal tambahan.

Modal DR tak kalah banyaknya dengan OA. Dalam pemilu 2014 di dapil Jawa Barat, Dessy yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPR RI menurut temuan penelitian berdasarkan keterangan dari informan SD<sup>7</sup> Pengurus DPP PAN dan juga anggota DPR RI FPAN paling tidak memiliki popularitas yang tak diragukan, mempunyai dana besar untuk pencalonan, merupakan putera asli daerah, dan aktif sebagai pengurus partai politik. Namun disayangkan Dessy tidak menguasai dengan perpolitikan apalagi ilmu pemerintahan.

c. Motivasi Status Sosial Ekonomi Selebritis Perempuan dalam Komunikasi Politik pada Pemilu

Menyoal motivasi selebritis perempuan membangun komunikasi politik pada pemilu 2014 tentu bukan hal yang gampang. Dari pencalonan OA bila dilihat dari motif ekonomi, menurut banyak informan tidaklah mungkin. Karena beliau sudah memiliki kekayaan yang cukup memadai untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan aktif di partai politik. Motif lainnya karena ia merasa populer dan mampu untuk melakukan kampanye.

d. Kemampuan Selebritis Perempuan dalam Menerapkan Peran Implementasi Kebijakan, Pengambilan Kebijakan dan Pengembangan Kebijakan

Penilaian kemampuan selebritis perempuan dalam menerapkan peran implementasi kebijakan, pengambilan kebijakan dan pengembangan kebijakan menjadi topik penting selanjutnya. Hasil temuan penelitian menyebutkan bahwa selebritis perempuan termasuk OA dan DR selama mereka masih memiliki referensi yang cukup seperti popularitas, finansial, religius, dan kemampuan komunikasi politik yang baik, maka mereka mampu menerapkan peran implementasi kebijakan, pengambilan kebijakan dan pengembangan kebijakan.

e. Dukungan Masyarakat Terhadap Komunikasi Politik Selebritis Perempuan Maju dalam Pemilu 2014

Dukungan masyarakat terhadap komunikasi politik selebritis perempuan yang maju dalam pemilu legislatif, menurut hasil temuan penelitian diperoleh data bahwa

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan AT Pengurus DPP PPP dan anggota DPR RI di ruang FPPP DPR RI, 19 Oktober 2015.

<sup>7</sup> Wawancara dengan SD Pengurus DPP PAN dan Anggota DPR RI FPAN di Kantor DPP PAN Jakarta, 19 Oktober 2015



masing-masing calon selebritis perempuan baik OA maupun DR memiliki ciri khas tersendiri di mata khalayak pemilih. Dukungan datang tidak hanya dari simpatisan dan konstituen partai politik pendukung masing-masing, tetapi dari individu dan kelompok sampai dengan organisasi sosial, organisasi masyarakat dan bahkan organisasi keagamaan.

Tak selamanya dukungan itu didasarkan atas kemampuan personal, materi, maupun popularitas semata. Berdasarkan temuan di lapangan, justru menunjukkan bentuk dukungan dari masyarakat yang berbeda. Satu hal melihat kekurangan para calon legislatif dari selebritis perempuan terlalu percaya diri dengan keartisan dan kemampuannya. Memang tidak semua primitif namun persentase primitifnya itu masih cukup besar jadi mereka akan terbawa pada detik terakhir siapa yang memberikan 'uang' itulah yang didukung. Mereka merasa kalau para tokoh itu kalau sudah jadi akan melupakan mereka karena keuntungan mereka pada masa saat pemilu itu.

#### f. Faktor Pendukung Selebritis Perempuan dalam Membangun Komunikasi Politik pada Pemilu 2014

Dari hasil paparan di atas, maka dapat tarik kesimpulan beberapa faktor pendukung selebritis perempuan dalam hal ini OA dan DR dalam membangun komunikasi politik pada pemilu 2014 antara lain: 1) mampu melakukan pendekatan dengan turun langsung ke bawah bertemu dengan masyarakat dan terutama pada tokoh-tokoh masyarakat; 2) mampu memahami anak buah yang ada di bawahnya agar memahami dari masing-masing komponennya; 3) sosok selebritis yang relegius dan mampu menjadi salah satu cermin yang patut diteladani, tidak saja tentang kedalaman ilmunya tetapi juga sikap dan perilaku kesehariannya; 4) memiliki popularitas tidak hanya lingkup daerah tetapi nasional; 5) kemampuan biaya yang memadai; 6) diusung oleh partai politik khususnya Partai-partai Islam seperti PPP dan PAN yang cukup besar.

## KESIMPULAN

Secara akademik, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk penelitian tahap berikutnya yang lebih komprehensif, dan mendalam dalam mengungkapkan permasalahan peran selebritis perempuan dalam komunikasi politik di partai-partai Islam pada pemilu di Indonesia.

Bagi partai politik, salah satu cara yang paling jitu untuk mendapatkan dukungan perempuan adalah dengan mengikutsertakan mereka ke dalam struktur kepengurusan organisasi partai politik. Karena perempuan merupakan bagian besar dari suatu populasi, maka dukungan mereka bagi partai sangatlah penting. Demikian halnya ketika rekrutmen calon pemimpin daerah yang akan didukung maju pada pemilu maka seharusnya partai politik lebih dulu mengutamakan kader partai yang potensial, militan, loyalitas tinggi dan memiliki kemampuan dalam pemerintahan. Walaupun merekrut calon luar partai semisal selebritis perempuan hendaknya tidak hanya menempatkan sebagai *vote gater*, karena selebritis memiliki popularitas dan kemampuan materi/finansial semata.

Sementara untuk lembaga legislatif, keberadaan perempuan dalam parlemen mustinya bisa dijadikan partner dan mitra kerja yang sinergis untuk bersama-sama melakukan fungsi, kewajiban, tugas dan kewenangan lembaga legislatif. Karena perempuan adalah representasi rakyat di daerah masing-masing yang memiliki kesadaran dan tanggungjawab untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi mewakili komunitasnya atau masyarakat luas secara langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

Disinilah selebritis perempuan dapat menjalin komunikasi politik terutama pada setiap tahapan Pemilu untuk mewujudkan representasi perempuan di lembaga legislative bahkan lembaga eksekutif.

Dari sudut kebijakan, agar pemerintah daerah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mengakomodasi kepentingan perempuan khususnya, guna menunjang pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Disamping itu, perlu adanya perubahan sistem regulasi terutama UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang nyata-nyata masih berpihak pada calon 'incumbent'.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gaffar. 1983. *Partisipasi Politik*. Jakarta: Rajawali Press. (Saduran) No Easy Choice, Political Participation in Developing Countries. Samuel P. Huntington. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1977.
- Alo Liliweri. 2002. *Makna Budaya dalam Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: LKiS.
- Anderson, M. L. 1983. *Thinking About Women: Sociological and Feminist Perspectives*. New York: Macmillan Publishers.
- Bengt, Abrahamson. 1977. *Bureocracy or Participation The Logic of Organization*. London: Sage Publication.
- Beilharz, Peter. 2003. *Teori-Teori Sosial*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Budiman, Arief. 1985. *Pembagian Kerja Secara Seksual: Sebuah Pembahasan Secara Sosiologis tentang Peran Perempuan di dalam Masyarakat*. Jakarta: Gramedia.
- Budi Susanto, dkk.(ed.). 1992. *Citra Wanita dan Kekuasaan (Jawa)*. Yogyakarta: Kanisius dan Lembaga Studi Realino.
- Bryson, Valerie. 1992. *Feminist Political Theory*. London: Macmillan.
- Cohen, J. M. & Uphoff. 1977. *Rural Development Participation Inhance*. New York: Cornel University.
- Davis Keith. 1967. *Human Relation at Work*. New York: McGrow Hill.
- Engels, F. 1972. *The Origins of The Famil, Private Property and The State*. New York: International Publishers.
- Fakih, M. 1996. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Goldhaber, Gerald M. 1990. *Organizational Communication*. WCB Publisher, Dubuque, Iowa, Fifth Edition.
- Hasrullah. 2001. *Megawati dalam Tangkapan Pers*. Yogyakarta: LKiS.
- Illich, Ivan. 1998. *Matinya Gender*. Edisi Indonesia. Alih Bahasa Omi Intan Naomi, Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Lany Verayanti, dkk. 2003. *Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam Sistem Masyarakat Matrilineal*. Padang: LP2M Padang.
- Lubis, T.Mulya., 1994. "Pembangunan Politik, Situasi Global dan Hak Asasi di Indonesia", dalam Munandar H. (Penyt.). *Kumpulan Esei Guna Menghormati Prof. Miriam Budiardjo*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Maran, Rafael R. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Mosse, J. Cleves. 1995. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, Lexy J, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 1978. "Political Communication and Public Opinion in America". Dalam *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek*. (terj.Tjun Surjaman), Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989.

- Nasution, Zulkarimein. 1990. *Komunikasi Politik Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nazir M. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Parsons, Talcott dan Robert F. Bales (eds.). 1955. *Family, Sozialization and Interaction Process*. Glencre, II : The Free Press.
- Patton MQ. 1980. *Qualitative Evaluation and Research Methods*. California: Sage Publications.
- Rich, Andrienne. 1976. *Syimbolic Interaction and Etnography Research*. New York: State University of New York
- Soetjipto AW. 1997. "Berbagai Hambatan Partisipasi Wanita dalam Politik". Dalam Smita Notosusanto dan Purwandari EK (Peny). *Perempunan Pemberdayaan*. Jakarta: Program Studi Kajian Wanita UI.
- Sutopo, H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Scott, James R., 2000. *Senjatanya Orang-orang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Umar, Nazaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina.
- Yin, R.K. 2000. *Studi Kasus (Desain dan Metode)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

#### **Laporan Penelitian dan Makalah**

- Diah Widarti. 1983. "Hubungan Antara Sektor S dan Sektor Informal di Kota". Dalam Zaenab Bakir dan Chris Manning (eds.); *Partisipasi Angkatan Kerja, Kesempatan Kerja dan Pengangguran di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, UGM.
- Partini, dkk. 1990. *Buruh Jahit di Pedesaan Jawa, Suatu Studi tentang Kondisi Sosial Ekonomi dan Strategi Kelangsungan Hidup*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, UGM.
- Parawansa, K.Indar. 2003. *Studi Kasus: Hambatan terhadap Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Meneg PP. (tidak diterbitkan).
- Sri Kusyuniati. 1989. *Buruh Wanita di Kawasan Industri Ungaran Jawa Tengah*. Yogyakarta: Makalah yang dipresentasikan di Pusat Penelitian Kependudukan, UGM.
- Suhatmini Hardyastuti. et al. 1990. *Pekerja Wanita Pada Industri Rumah Tangga Sandang di Propinsi DI Yogyakarta*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, UGM.
- Wiwik Widayanti. 1991. *Perilaku Motivasi Kerja dan Sumbangan Wanita dalam Ekonomi Rumah Tangga*. Skripsi Mahasiswa Jurusan Sosiologi, UGM, Yogyakarta, (tidak diterbitkan).

#### **Surat Kabar dan Referensi Lainnya**

- Kompas*, edisi 22 Mei 1999.
- [www.muslimpoliticians.blogspot.com](http://www.muslimpoliticians.blogspot.com)
- Profil Partai Persatuan Pembangunan.
- Profil Partai Anamat Nasional.